



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Sistem data gender dan anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
11. Forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi SKPK di Kabupaten dan wadah komunikasi SKPK di Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.
12. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang

terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.

13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Strategi pengarusutamaan hak anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
18. Data adalah sejumlah informasi yang belum diolah yang dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara atau tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai informasi.
19. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/ atau sudah dipublikasikan.
20. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
21. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
22. Data anak adalah data tentang kondisi tumbuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki-laki, sejak dalam kandungan sampai dengan usia dibawah 18 tahun.
23. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu.

BAB II Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip SIGA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA bagi SKPK/Instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penggunaan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. memperkuat dan mendorong SKPK/Instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan sumber daya terlatih dan ketersediaan mekanisme pengumpulan data terpilah;
- c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK/Instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan SIGA;
- d. meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. strategi dan kebijakan;
- b. pengelolaan data SIGA;
- c. penyelenggaraan SIGA;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. spesifik, yaitu data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara tanggung jawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur ilmiah;
- c. dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;

- d. relevan, yaitu data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. berkelanjutan, yaitu pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 6

- (1) menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) meningkatkan komitmen di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan daerah.
- (3) meningkatkan pemahaman SKPK/Instansi terkait dan masyarakat tentang SIGA baik di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola data SIGA dalam memfasilitasi penyediaan data terpilah gender di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Penguatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi lintas SKPK/Instansiterkait.
- (2) Penguatan kelembagaan/forum data gender dan anak.
- (3) Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak.
- (4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak.

BAB IV PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Pengelompokan Data

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Data terpilah dikelompokkan:
 - a. data gender;

- b. data anak;
 - c. data kelembagaan.
- (2) Data Gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. data umum;
 - b. data gender bidang ekonomi;
 - c. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
 - d. data perlindungan hak perempuan;
 - e. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- (3) Data anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan;
 - e. perlindungan khusus.
- (4) Data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. data kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - b. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak;
- (5) Pengelolaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.

Bagian Ketiga Pengolahan dan Analisa

Pasal 10

- (1) Pengolahan data gender dan anak dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indikator yang dapat menggambarkan kesetaraan gender pada input, output, outcome dan impact di masing-masing SKPK/Instansi terkait;
- (2) Identifikasi sumber-sumber data terpilah baik dari sensus penduduk, survey, penelitian/ kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, observasi, FGD atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh SKPK/Instansi terkait;

- (3) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan.
- (4) Data SIGA yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah Aplikasi SIGA.

Bagian Keempat
Penyajian Data

Pasal 11

- (1) Penyajian data terpilah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, info grafis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya;
- (3) Data SIGA yang telah diinput dalam Aplikasi SIGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dapat disajikan berupa Buku Data Gender dan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data

Pasal 12

- (1) Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Data terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK/Instansi terkait;
- (3) Data terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.
- (4) Sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SIGA

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum SIGA

Pasal 13

- (1) Forum SIGA Aceh Barat Daya dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Daya;
- (2) Forum SIGA Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya;

Pasal 14

- (1) Forum SIGA Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

- c. Ketua : Aceh Barat Daya
: Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya
- e. Anggota : Kepala SKPK / SIGA SKPK / Instansi terkait
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat tim yang terdiri dari :
- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya
- b. Ketua : Kepala Bidang yang menangani Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya
- c. Sekretaris : Pejabat yang menangani Data dan Informasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya
- d. Anggota : Pejabat Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat Daya

Pasal 15

- (1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;
- (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA SKPK dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (4) Penyelenggaraan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka persiapan, pengumpulan dan penginputan data;
- (5) Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengikutsertakan Forum Penyelenggara SIGA SKPK Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya forum SIGA Kabupaten Aceh Barat Daya berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam hal penyediaan data.

Bagian Ketiga Tugas Tim Teknis

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkoordinasi dengan Pokja PUG dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. Sebagai Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
 - b. Sebagai Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPK/Instansi terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. Menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPK/Instansi terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin efektivitas, sinergisitas dan kesinambungan penyelenggaraan data SIGA, Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIGA SKPK Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SIGA.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan SIGA tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap enam bulan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melalui Forum SIGA Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan SIGA SKPK terkait dalam Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan SIGA, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan SIGA merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

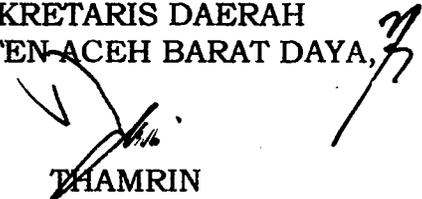
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 R. Akhir 1440 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 R. Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 57

JENIS DATA TERPILAH

A. DATA GENDER

I. Data Umum

1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam hal ini digunakan konsep dari BPS yaitu bahwa pencacahan penduduk menggunakan konsep "de jure" atau konsep dimana seseorang biasanya menetap bertempat tinggal (usual residence) dan konsep "de facto" atau konsep dimana seseorang berada pada saat pencacahan. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

TABEL 1.1
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		L	%	P	%	JUMLAH
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susoh					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber data : BPS/Registrasi Kependudukan

2. Jumlah Kepala Rumah Tangga

Konsep yang dipakai berdasarkan definisi BPS yaitu Rumah Tangga. Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari harinya dikelola menjadi satu :

TABEL 1.2
JUMLAH DAN PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA				
		L	%	P	%	JUMLAH
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susoh					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber data : BPS/Registrasi Kependudukan

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
 Merupakan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir, sedangkan penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhirnya.

TABEL 1.3.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS
KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur											
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun		18-50 Tahun		51 Tahun keatas		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Lembah Sabil												
2	Manggeng												
3	Tangan - Tangan												
4	Setia												
5	Blangpidie												
6	Susoh												
7	Jeumpa												
8	Kuala Batee												
9	Babahrot												

Sumber data : BPS/Registrasi Kependudukan

TABEL 1.3.2
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI YANG
DITAMATKAN MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA			AKADEMI/PT			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil															
2	Manggeng															
3	Tangan - Tangan															
4	Setia															
5	Blangpidie															
6	Susoh															
7	Jeumpa															
8	Kuala Batee															
9	Babahrot															

Sumber Data : Dinas Registrasi Kependudukan

4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa (bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (bobot 1/3) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP Rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

TABEL 1.4
INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
MENURUT KOMPONEN DI KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP %	HARAPAN LAMA SEKOLAH %	RATA - RATA LAMA SEKOLAH %	PENGELUARAN PERKAPITA %	IPM %
1	Abdya					
2	Lembah Sabil					
3	Manggeng					
4	Tangan - Tangan					
5	Setia					
6	Blangpidie					
7	Susoh					
8	Jeumpa					
9	Kuala Batee					
10	Babahrot					

Sumber Data : BPS, Kementerian PPPA RI

5. **Indek Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan dengan menggambarkan ketimpangan gender. Nilai indeks berkisar 0 - 100.

TABEL. 1.5
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
MENURUT KOMPONEN DI KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	ANGKA HARAPAN HIDUP		HARAPAN LAMA SEKOLAH		RATA - RATA LAMA SEKOLAH		PENGELUARAN PERKAPITA		IPG	
		%		%		%		%		%	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Abdya										
2	Lembah Sabil										
3	Manggeng										
4	Tangan - Tangan										
5	Setia										
6	Blangpidie										
7	Susoh										
8	Jeumpa										
9	Kuala Batee										
10	Babahrot										

Sumber Data : BPS, Kementerian PPPA RI

6. **Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen diantara anggota legislatif. Pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Nilai indeks berkisar 0 - 100.

TABEL 1.6
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
MENURUT KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
		%	%	%	%
1	Abdya				
2	Lembah Sabil				
3	Manggeng				
4	Tangan - Tangan				
5	Setia				
6	Blangpidie				
7	Susoh				
8	Jeumpa				
9	Kuala Batee				
10	Babahrot				

Sumber Data : BPS, Kementerian PPPA RI

II. Data Gender Bidang Ekonomi

1. Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK)

Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.

TABEL 2.1
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK		SARJANA, DIPLOMA		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Abdya										
2	Lembah Sabil										
3	Manggeng										
4	Tangan - Tangan										
5	Setia										
6	Blangpidie										
7	Susoh										
8	Jeumpa										
9	Kuala Batee										
10	Babahrot										

Sumber Data : BPS/Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan

TABEL 2.2.1
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	JENIS JELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : BPS, Bappeda

TABEL 2.2.2
JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN DAN ANGKA KEMISKINAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin			Jumlah Angka Kemiskinan		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Bappeda

3. Tenaga Kerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal yang berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).

TABEL 2.3
JUMLAH TENAGA KERJA MIGRAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN
KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerga Migran			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

4. Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Tenaga Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya

TABEL 2.4
JUMLAH TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH MENURUT
JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja AKAD			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

5. Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri

TABEL 2.5
JUMLAH TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja AKAN			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

6. Jumlah Pekerja di Sektor Formal

Yang digolongkan bekerja di sektor formal dalam sakernas (menggunakan pendekatan status pekerjaan) adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan adalah berusaha dengan dibantu tetap/buruh dibayar atau sebagai buruh/karyawan/pegawai. Indikator ini digunakan untuk melihat gambaran daya serap sektor formal terhadap penduduk.

TABEL 2.6
JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR FORMAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Formal			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

7. Jumlah Pekerja di Sektor Informal

Pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian dan non pertanian serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

TABEL 2.7
JUMLAH PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Tenaga Kerja Informal			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

8. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
 Merupakan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) individu perorangan yang terdaftar

TABEL 2.8
JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
MENURUT JENIS KELAMIN PEMILIK USAHA
DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	USAHA KECIL			USAHA KECIL			USAHA KECIL		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Daya : Diskop, UKM Perindag

9. Keanggotaan Koperasi
 Anggota koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat –syarat sebagai berikut :
- a. Membayar simpanan pokok
 - b. Membayar simpanan wajib
 - c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan /dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART
 - d. Telah menandatangani buku daftar anggota

9

TABEL 2.9
JUMLAH KEANGGOTAAN KOPERASI
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Keanggotaan Koperasi		JUMLAH
		L	P	
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : Diskop, UKM Perindag

10. Jumlah Pengangguran

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, Pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TABEL 2.10
JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Pengangguran Terbuka		JUMLAH
		L	P	
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

11. Pekerja Tak Dibayar

Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

TABEL 2.11
JUMLAH PEKERJA TIDAK DIBAYAR
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Pekerja Tidak Dibayar		JUMLAH
		L	P	
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

12. Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja sebagai tenaga profesional atau manajerial terhadap jumlah penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja. Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang bekerja di level manajer.

TABEL 2.12
JUMLAH DAN PERSENTASE PEKERJA PROFESIONAL
DAN MANAJERIAL DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial					
		L	P	JUMLAH	L	P	%
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

13. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

a. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan usaha/lembaga tempat responden bekerja.

b. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama.

Status Pekerjaan dikelompokkan :

- Berusaha Sendiri adalah bekerja tau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan

tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- Buruh/karyawan/pegawai tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
- Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain majikan institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumahtangga maupun bukan usaha rumahtangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja Bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/intitusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

c. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya.

Lapangan pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa).

Lapangan Pekerjaan dikelompokkan :

- Lapangan Pekerjaan Jasa kemasyarakatan adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut pengaturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertanahan, negar, keamanan dan keselamatan negara. Katagori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga profesional.
- Industri Pengolahan adalah suatu unit/kesatuan produksi yang terletak oada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda barang produk baru yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat dengan kepada konsumen

akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan.

- Lapangan Pekerjaan Lainnya adalah lapangan usaha kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estate, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.

TABEL 2.13.1
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Pertanian, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan		JUMLAH	Pertambangan dan Penggalian		JUMLAH
		L	P		L	P	
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TABEL 2.13.2
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Industri Pengolahan		JUMLAH	Listrik, Gas dan Air		JUMLAH
		L	P		L	P	
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TABEL 2.13.3
 JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
 STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
 MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
 TAHUN

NO	KECAMATAN	Bangunan/ Kontruksi		JUMLAH	Pedagang Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel		JUMLAH
		L	P		L	P	
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TABEL 2.13.4
 JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
 STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
 MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
 TAHUN

NO	KECAMATAN	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi		JUMLAH	Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan		JUMLAH
		L	P		L	P	
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TABEL 2.13.5
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
STATUS PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jasa Kemasyarakata n, Sosial dan Perorangan		JUMLAH	TOTAL (Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin)		TOTAL
		L	P		L	P	
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan – Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

III. Data Gender Bidang Politik

1. Partisipasi Di Lembaga Legislatif (DPRK)

Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan di parlemen di antara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja yang profesional dan teknisi yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

a. Jumlah anggota DPRK menurut Komisi

TABEL 3.1.1
JUMLAH ANGGOTA DPRK DI LEGISLATIF
MENURUT KOMISI DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KOMISI	Anggota DPRK			KETERANGAN
		L	P	JUMLAH	
1	A				
2	B				
3	C				
4	D				

Sumber Data : Kesbangpol Linmas

b. Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai Politik

TABEL 3.2.2
JUMLAH CALON LEGISLATIF DAN PENGURUS HARIAN
PARTAI POLITIK MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	Keanggotaan Partai Politik			Pengurus Harian Partai Politik		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Abdya						
2	Lembah Sabil						
3	Manggeng						
4	Tangan - Tangan						
5	Setia						
6	Blangpidie						
7	Susoh						
8	Jeumpa						
9	Kuala Batee						
10	Babahrot						

Sumber Data : Kesbangpol Linmas

2. Partisipasi Di Lembaga Yudikatif (Jaksa, Hakim, Polisi)

a. Jumlah Jaksa dan Jaksa Menurut Jabatan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

TABEL 3.2.1
JUMLAH JAKSA MENURUT JABATAN JAKSA DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KABUPATEN/KECA MATAN	STRUKTURAL			FUNGSIONAL			TOTAL		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Abdya									
2	Lembah Sabil									
3	Manggeng									
4	Tangan - Tangan									
5	Setia									
6	Blangpidie									
7	Susoh									
8	Jeumpa									
9	Kuala Batee									
10	Babahrot									

Sumber Data : Kanwilkemenkumham

b. Jumlah Hakim dan Pejabat Menurut Jenis Jabatan Hakim di
 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama

TABEL 3.2.2
JUMLAH HAKIM DAN PEJABAT MENURUT JENIS JABATAN HAKIM DAN JENIS
KELAMIN DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI
KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KABUPATEN/KECAMATAN	HAKIM			PEJABAT PENGADILAN			PEJABAT PENGADILAN AGAMA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Abdya									
2	Lembah Sabil									
3	Manggeng									
4	Tangan - Tangan									
5	Setia									
6	Blangpidie									
7	Susoh									
8	Jeumpa									
9	Kuala Batee									
10	Babahrot									

Sumber Data : Kanwilkemenkumham

c. Jumlah Polisi dan Pejabat di Kepolisian

TABEL 3.2.3
JUMLAH POLISI DAN PEJABAT DI KEPOLISIAN MENURUT JENIS
DI KABUPATEN DAN KECAMATAN
TAHUN

NO	KABUPATEN/KECAMATAN	POLISI			KAPOLRES			WAKAPOLRES			WAKAPOLSEK		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Abdya												
2	Lembah Sabil												
3	Manggeng												
4	Tangan - Tangan												
5	Setia												
6	Blangpidie												
7	Susoh												
8	Jeumpa												
9	Kuala Batee												
10	Babahrot												

Sumber Data : Kanwilkemenkumham

3. Partisipasi Di Lembaga Eksekutif (PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional, PNS Menurut Pangkat dan Golongan, Camat, Bupati). Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintahan yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Kabupaten, Camat dan Kepala Desa.

a. Jumlah PNS berdasarkan Golongan

TABEL 3.3.1

**JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN**

NO	KABUPATEN/KECAMATAN	Gol. I			Gol. II			Gol. III			Gol. IV			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Abdya															
2	Lembah Sabii															
3	Manggeng															
4	Tangan - Tangan															
5	Setia															
6	Blangpidie															
7	Susoh															
8	Jeumpa															
9	Kuala Batee															
10	Babahrot															

Sumber Data : BKPSDM

- b. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon
Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon II s/d V dalam Kabupaten Aceh Barat Daya antara Laki-laki dan Perempuan.

**TABEL 3.3.2
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN ESELON
MENURUT KELAMIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN**

NO	KABUPATEN/KECAMATAN	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Eselon V			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Abdya															
2	Lembah Sabil															
3	Manggeng															
4	Tangan - Tangan															
5	Setia															
6	Blangpidie															
7	Susoh															
8	Jeumpa															
9	Kuala Batee															
10	Babahrot															

Sumber Data : BKPSDM

- c. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, perlu komitmen BAPERJAKAT bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

TABEL 3.3.3

**TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN**

NO	KABUPATEN	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)		
		L	P	Jumlah
1	Abdya			

Sumber Data : BKPSDM

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya (Penghunu Lembaga Pemasyarakatan, Penghuni Rumah Tahanan, Penduduk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Pengungsi Akibat Bencana.

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.

TABEL 3.4.1

**JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
MENURUT JENIS KELAMIN KECAMATAN
TAHUN**

NO	KECAMATAN	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : Kesbangpol Linmas

b. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis,

dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan, pekerja/buruh dan keluarganya.

TABEL 3.4.2
JUMLAH SERIKAT PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Serikat Pekerja/Serikat Buruh			Keterangan
		L	P	JUMLAH	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data: DPMPSTP NAKERTRANS

c. Jumlah Guru dan Dosen Menurut Jenjang Pendidikan

TABEL 3.4.3
JUMLAH GURU DAN DOSEN NEGERI/SWASTA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	GURU TK/RA			GURU SD/MI			GURU SMP/MTs			GURU SMA/SMK /MA			DOSEN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil															
2	Manggeng															
3	Tangan - Tangan															
4	Setia															
5	Blangpidie															
6	Susoh															
7	Jeumpa															
8	Kuala Batee															
9	Babahrot															

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi

TABEL 3.4.4

4	Setia																		
5	Blangpidie																		
6	Susoh																		
7	Jeumpa																		
8	Kuala Batee																		
9	Babahrot																		

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- g. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta Dosen Penerima Beasiswa

TABEL 3.4.7
JUMLAH GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN (GTK) SERTA DOSEN
YANG MEMPEROLEH BEASISWA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	GTK TK/RA			GTK SD/MI			GTK SMP/MTs			GTK SMA/SM K/MA			DOSEN					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH			
1	Lembah Sabil																		
2	Manggeng																		
3	Tangan - Tangan																		
4	Setia																		
5	Blangpidie																		
6	Susoh																		
7	Jeumpa																		
8	Kuala Batee																		
9	Babahrot																		

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IV. Data Perlindungan Hak Perempuan

1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

- a. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur.

g

TABEL 4.1.1
 JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
 KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN.....

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR				TOTAL	
		0-18Thn (Anak)		>18Thn (Dewasa)			
		L	P	L	P	L	P
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : P2TP2A

- b. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan.

TABEL 4.1.2
 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TINGKAT
 PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMP/Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil																		
2	Manggeng																		
3	Tangan - Tangan																		
4	Setia																		
5	Blangpidie																		
6	Susoh																		
7	Jeumpa																		
8	Kuala Batee																		
9	Babahrot																		

Sumber Data : P2TP2A

- c. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pekerjaan.

TABEL 4.1.3
 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
 MENURUT PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN....

NO	KECAMATAN	Bekerja			Tidak Bekerja			Total		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : P2TP2A

d. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan.

TABEL 4.1.4
 JUMLAH KORBAN KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN MENURUT STATUS PERKAWINAN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN....

NO	KECAMATAN	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : P2TP2A

e. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan.

TABEL 4.1.5
 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
 MENURUT JENIS KEKERASAN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan-Tangan						

4	Seria						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : P2TP2A

- f. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian.

TABEL 4.1.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TEMPAT KEJADIAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : P2TP2A

- g. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan yang Diberikan.

TABEL 4.1.7
JUMLAH KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS LAYANAN
YANG DIBERIKAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Jenis Layanan Yang Diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan dan Reinterigasi
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susch					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber Data : P2TP2A

h. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan.

TABEL 4.1.8
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT FREKUENSI KEKERASAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : P2TP2A.

i. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.

TABEL 4.1.9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur									Total		
		Anak (<18 Tahun)			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)					
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil												
2	Manggeng												
3	Tangan - Tangan												
4	Setia												
5	Blangpidie												
6	Susoh												
7	Jeumpa												
8	Kuala Batee												
9	Babahrot												

Sumber Data : P2TP2A

9

- j. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan.

TABEL 4.1.10
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN...

NO	KECAMATAN	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi			
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	
1	Lembah Sabil																			
2	Manggeng																			
3	Tangan - Tangan																			
4	Setia																			
5	Blangpidie																			
6	Susoh																			
7	Jeumpa																			
8	Kuala Batee																			
9	Babahrot																			

Sumber Data : P2TP2A

- k. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan.

TABEL 4.1.11
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PEKERJAAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Bekerja			Tidak Bekerja			Total		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : P2TP2A

1. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan Dengan Korban.

TABEL 4.1.12
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT HUBUNGAN DENGAN KORBAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Hubungan dengan korban							
		Orang Tua		Keluarga		Suami	Istri	Lainnya	
		L	P	L	P			L	P
1	Lembah Sabil								
2	Manggeng								
3	Tangan - Tangan								
4	Setia								
5	Blangpidie								
6	Susoh								
7	Jeumpa								
8	Kuala Batee								
9	Babahrot								

Sumber Data : P2TP2A

- m. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kebangsaan.

TABEL 4.1.13
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KEBANGSAAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : P2TP2A

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang
 a. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

TABEL 4.2.1
 JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN....

NO	KECAMATAN	Kelompok Umur									Total			
		Anak (<18 Tahun)			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)						
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	
1	Lembah Sabil													
2	Manggeng													
3	Tangan - Tangan													
4	Setia													
5	Blangpidie													
6	Susoh													
7	Jeumpa													
8	Kuala Batee													
9	Babahrot													

Sumber Data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Abdya

- b. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan.

TABEL 4.2.2
 JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
 MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN....

NO	KECAMATAN	Tidak/ Belum Sekolah			Belum Tamat SD			SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat			SMA/ Sederajat			Perguruan Tinggi		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil																		
2	Manggeng																		
3	Tangan - Tangan																		
4	Setia																		
5	Blangpidie																		
6	Susoh																		
7	Jeumpa																		
8	Kuala Batee																		
9	Babahrot																		

Sumber Data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Abdya

c. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan.

TABEL 4.2.3
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN					
		Belum Kawin		Kawin		Cerai	
		L	P	L	P	L	P
1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Abdya

d. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan.

TABEL 4.2.4
JUMLAH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	Penanda tangan Identifikasi	Layanan Psiko sosial	Rehabilitasi Medis	Rehabilitasi Sosial	Bantuan Hukum	Pemulangan	Reintegrasi Sosial
1	Lembah Sabil							
2	Manggeng							
3	Tangan - Tangan							
4	Setia							
5	Blangpidie							
6	Susoh							
7	Jeumpa							
8	Kuala Batee							
9	Babahrot							

Sumber Data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Abdya

e. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses Hukum Terhadap Pelaku.

TABEL 4.2.5
JUMALH PELAKU KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT TINGKATAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU
DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	TINGKATAN PROSES HUKUM						Keterangan
		Penyidikan		Penuntutan		Putusan Pengadilan		
		L	P	L	P	L	P	
1	Lembah Sabil							
2	Manggeng							
3	Tangan - Tangan							
4	Setia							
5	Blangpidie							
6	Susoh							
7	Jeumpa							
8	Kuala Batee							
9	Babahrot							

Sumber Data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Abdya

f. Amar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

TABEL 4.2.6
AMAR PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PERDANGAN ORANG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN....

NO	KECAMATAN	AMAR PUTUSAN			KETERANGAN
		Pidana (Thn)	Denda (Rp.)	Restitusi (Rp.)	
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Abdya

i. Jumlah Warga Binaan pada Lapas Umum

TABEL 4.2.9
JUMLAH WARGA BINAAN PADA LAPAS UMUM DAN TINGKAT
PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KABUPATEN	PENDIDIKAN				
		LAPAS UMUM				
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT	JLH
1	Abdya					

Sumber Data : Kemenkumham

j. Jumlah Warga Binaan Pada Lapas Umum dan Kelompok Umur.

TABEL 4.2.10
JUMLAH WARGA BINAAN PADA LAPAS UMUM DAN KELOMPOK
UMUR
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KABUPATEN	KELOMPOK UMUR						
		LAPAS UMUM						
		18-25 THN	26-35 THN	36-45 THN	46-55 THN	56-65 THN	66 THN KE ATAS	JLH
1	Abdya							

Sumber Data : Kemenkumham

k. Jumlah Warga Binaan Menurut Jenis Lapas dan Kasus.

TABEL 4.2.11
JUMLAH WARGA BINAAN PADA LAPAS UMUM DAN KASUS
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KABUPATEN	KASUS						
		LAPAS UMUM						
		Pembu nuhan	Pencuri an	Pemer kosaan	Asusila	NAPZA	KD RT	Lain
1	Abdya							

Sumber Data : Kemenkumham

V. Data Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

1. Legalitas dan Struktur Keluarga

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundang-undang yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya.

a. Legalitas Perkawinan

Bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi penduduk yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebaliknya, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

TABEL 5.1.1
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN DI KAB.
ABDYA DAN KEPEMILIKAN BUKU/AKTE NIKAH KEPALA RUMAH
TANGGA DAN PASANGAN YANG BERSTATUS KAWIN
TAHUN

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA DENGAN KRT BERSTATUS KAWIN	KEPEMILIKAN BUKU/AKTE NIKAH		
			MEMILIKI	TIDAK MEMILIKI	TOTAL
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Kemenag Abdya

TABEL 5.1.2
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS DI PENGADILAN
AGAMA MENURUT SUMBER PERMOHONAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	SUMBER PERMOHONAN	
			PERMOHONAN SUAMI	GUGATAN ISTRI
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : Mahkamah Syariah

b. Legalitas Kelahiran

Bukti asli mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat dari pemerintah.

TABEL 5.1.3
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN
ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART)
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ART			
			SELURUH ART	SEBAGIAN ART	TIDAK ADA	TOTAL
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susoh					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Ketahanan Fisik

Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Diantara ketahanan fisik dimaksud adalah Kecukupan Pangan dan Gizi yaitu kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi.

TABEL 5.2.1
PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI BERDASARKAN
KRITERIA BERAT BADAN MENURUT UMUR
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	STATUS GIZI BALITA			
		BURUK	KURANG	BAIK	LEBIH
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				

III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Angka Kematian Bayi menurut jenis kelamin

TABEL 3.1
ANGKA KEMATIAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Angka Kematian Bayi (AKB)		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

2. Angka Kematian Balita

TABEL 3.2
ANGKA KEMATIAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Angka Kematian Balita (AKBa)		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

4

3. Persentase Ibu Hamil Memperoleh Pemeriksaan Kehamilan (K1-K4)

TABEL 3.3
 JUMLAH DAN PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL
 (K1/K4) KE SARANA PELAYANAN KESEHATAN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	K1		K1	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susoh					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber Data : Dinkes

4. Jumlah Bayi Memperoleh Imunisasi Dasar dan Lengkap

TABEL 3.4
 JUMLAH BAYI YANG MEMPEROLEH IMUNISASI DASAR
 DAN LENGKAP MENURUT JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia 12-23 bln Telah Diimunisasi Lengkap		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

4

5. Persentase Balita Memperoleh Imunisasi Lanjutan

TABEL 3.5
 JUMLAH ANAK UMUR <1 TAHUN DI IMUNISASI CAMPAK
 MENURUT JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Umur <1 Tahun di imunisasi Campak		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

6. Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)

TABEL 3.6
 JUMLAH BAYI LAHIR DENGAN BERAT BADAN RENDAH
 MENURUT JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Bayi Lahir		Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah	
		L	P	L	P
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

7. Jumlah Kasus Balita Dengan Kurang Gizi dan Gizi Buruk

TABEL 3.7
JUMLAH BALITA DENGAN KURANG GIZI GIZI BURUK
MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Balita Dengan Gizi Kurang		Balita Dengan Gizi Buruk	
		L	P	L	P
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

8. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

TABEL 3.8
BAYI YANG MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF SELAMA 6 BULAN
MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Bayi Lahir		Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 Bulan	
		L	P	L	P
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

60

IV. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 2-4 Tahun

TABEL 4.1
JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jlh Anak Usia 0-6 Tahun	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak Terlayani (F+NF)	Jumlah Belum Terlayani	Prosentase terlayani (F+N+F)	Prosentase terlayani (F+N+F)
			Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik				
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.2
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

4

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.3
 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	7 - 12 TAHUN			13 - 15 TAHUN			16 - 18 TAHUN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, SD, SMP, SMA Sederajat

TABEL 4.4
 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
 MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

V. Perlindungan Khusus

1. Jumlah Anak Korban Bencana

TABEL 5.1

JUMLAH PENGUNGSI ANAK DAN REMAJA AKIBAT KORBAN BENCANA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	ANAK - ANAK									REMAJA					
		BAYI (USIA 0-1 TAHUN)			BALITA (USIA 1-5 TAHUN)			KANAK-KANAK 6-11 TAHUN			AWAL (USIA 12-17 TAHUN)			AKHIR (USIA 18-25 TAHUN)		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil															
2	Manggeng															
3	Tangan - Tangan															
4	Setia															
5	Blangpidie															
6	Susoh															
7	Jeumpa															
8	Kuala Batee															
9	Babahrot															

Sumber Data : BPBK

2. Jumlah anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

TABEL 5.2.1

JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	SD/SEDERAJAT			SMP/SEDERAJAT			SMA/SEDERAJAT		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : P2TP2A, Polres Abdya, Kemenkumham

90

TABEL 5.2.2
 JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR 7-12 THN			KELOMPOK UMUR 13-15 THN			KELOMPOK UMUR 16-18 THN		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil									
2	Manggeng									
3	Tangan - Tangan									
4	Setia									
5	Blangpidie									
6	Susoh									
7	Jeumpa									
8	Kuala Batee									
9	Babahrot									

Sumber Data : P2TP2A, Polres Abdya, Kemenkumham

TABEL 5.2.3
 JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	KASUS							
		Pembu nuhan	Pencuri an	Pemerk osaan	Asusi la	NAFZA	KD RT	Lain	TOTAL
1	Lembah Sabil								
2	Manggeng								
3	Tangan - Tangan								
4	Setia								
5	Blangpidie								
6	Susoh								
7	Jeumpa								
8	Kuala Batee								
9	Babahrot								

Sumber Data : P2TP2A, Polres Abdya, Kemenkumham

3. Jumlah Pekerja Anak

TABEL 5.3
 JUMLAH PEKERJA ANAK MENURUT JENIS KELAMIN
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	PEKERJA ANAK		
		L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			

5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : DPMPTSP Nakertrans

4. Persentase Anak Yang Menjadi Korban Penyalah Gunaan NAPZA

TABEL 5.4
JUMLAH ANAK YANG MENGGUNAKAN NAFZA
MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Anak Yang Menggunakan NAFZA		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes, BNN

5. Jumlah Anak Terinfeksi HIV dan Menderita AIDS

TABEL 5.5
JUMLAH ANAK YANG TERINFEKSI HIV DAN MENDERITA AIDS
MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Terinfeksi HIV		Jumlah Anak Menderita AIDS	
		L	P	L	P
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinkes

6. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak

TABEL 5.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	FISIK			PSIKIS			SEKSUAL			KDRT			PENELANTARAN			LAINNYA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil																		
2	Manggeng																		
3	Tangan - Tangan																		
4	Setia																		
5	Blangpidie																		
6	Susoh																		
7	Jeumpa																		
8	Kuala Batee																		
9	Babahrot																		

Sumber Data : P2TP2A

7. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian

TABEL 5.7
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT TEMPAT KEJADIAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	RUMAH			SEKOLAH			RUANG PUBLIK			LAINNYA		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Lembah Sabil												
2	Manggeng												
3	Tangan - Tangan												
4	Setia												
5	Blangpidie												
6	Susoh												
7	Jeumpa												
8	Kuala Batee												
9	Babahrot												

Sumber Data : P2TP2A

8. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Mendapat Layanan

TABEL 5.8
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT LAYANAN YANG DIBERIKAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	LAYANAN PEREMPUAN	LAYANAN KESEHATAN	REHABILITASI SOSIAL	PENEGAKAN HUKUM	PENDAMPINGAN PEMULANGAN/REN

11. Jumlah Anak Terlantar

TABEL 5.11
JUMLAH ANAK TERLANTAR MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR		
		L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : Dinas Sosial

12. Jumlah Anak Jalanan

TABEL 5.12
JUMLAH ANAK JALANAN MENURUT JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	ANAK TERLANTAR		
		L	P	JUMLAH
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : Dinas Sosial

C. DATA KELEMBAGAAN

I. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Kelembagaan PUG

TABEL 1.1
JUMLAH POKJA PUG, FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
(PKHP), FORUM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP),
FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, FORUM SIGA DAN FOKAL POINT GENDER
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	POKJA PUG	PKHP	PPEP	FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	FORUM SIGA	FOCAL POINT GENDER

1	Lembah Sabil						
2	Manggeng						
3	Tangan - Tangan						
4	Setia						
5	Blangpidie						
6	Susoh						
7	Jeumpa						
8	Kuala Batee						
9	Babahrot						

Sumber Data : Dinas DPMP4 Abdya

TABEL 1.1.1
DAFTAR KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER

NO	KECAMATAN	NAMA PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	Lembah Sabil		
2	Manggeng		
3	Tangan - Tangan		
4	Setia		
5	Blangpidie		
6	Susoh		
7	Jeumpa		
8	Kuala Batee		
9	Babahrot		

Sumber Data : Dinas DPMP4 Abdya

2. Kelembagaan PUG Bidang Kesehatan

TABEL 2.1
JUMLAH LAYANAN KESEHATAN YANG MELAYANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN KESEHATAN				JUMLAH
		RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	KLINIK	LAINNYA	
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susoh					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial

3. (Kecamatan Sayang IBU, RS Sayang IBU, Kelompok Suami Antar Jaga) dan Kader Bina Keluarga Balita

TABEL 1.3

JUMLAH POKJATAB GERAKAN SAYANG IBU (GSI), RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RS-SIB), KELOMPOK SUAMI SIAP, ANTAR, JAGA (SUAMI SIAGA) DAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN

NO	KECAMATAN	SEKOLAH INKLUSIF			
		GSI	RS-SIB	SUAMI SIAGA	KADER BKB
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : Dinas Kesehatan

4. Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan (Pokjatat PBAP, Gugus Tugas PBAP, Kader BKB)

TABEL 1.4

JUMLAH POKJATAP PENURUNAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (PBAB) DAN GUGUS TUGAS PBAP DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN

NO	KECAMATAN	PBAP	GUGUS TUGAS PBAP
1	Lembah Sabil		
2	Manggeng		
3	Tangan - Tangan		
4	Setia		
5	Blangpidie		
6	Susoh		
7	Jeumpa		
8	Kuala Batee		
9	Babahrot		

Sumber Data : Dinas Pendidikan

5. Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi (Desa Prima, P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi Perempuan, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Tani/Nelayan Perempuan)

TABEL 1.5.1

JUMLAH DESA PRIMA (PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Lembah Sabil	
2	Manggeng	
3	Tangan - Tangan	

4	Setia	
5	Blangpidie	
6	Susoh	
7	Jeumpa	
8	Kuala Batee	
9	Babahrot	

Sumber Data : DPMP4, Diskop,UKM,Perindag

TABEL 1.5.2

PROGRAM P2WKSS, JUMLAH UMKM, KOPERASI, ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PEREMPUAN, BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM), KOPERASI PEREMPUAN, DAN KELOMPOK TANI/NELAYAN PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN

NO	KECAMATAN	P2WKSS	UMKM	KOPERASI	ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	KELOMPOK USAHA PEREMPUAN	KELOMPOK TANI PEREMPUAN	KELOMPOK NELAYAN PEREMPUAN
1	Lembah Sabil								
2	Manggeng								
3	Tangan - Tangan								
4	Setia								
5	Blangpidie								
6	Susoh								
7	Jeumpa								
8	Kuala Batee								
9	Babahrot								

Sumber Data : DPMP4, Diskop,UKM,Perindag

6. Kelembagaan Pelayanan Terpadu (P2TP2A)

TABEL 1.6

DAFTAR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN

NO	KECAMATAN	NAMA P2TP2A	ALAMAT	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
1	Lembah Sabil			
2	Manggeng			
3	Tangan - Tangan			
4	Setia			
5	Blangpidie			
6	Susoh			
7	Jeumpa			
8	Kuala Batee			
9	Babahrot			

Sumber Data : DPMP4 Abdya

II. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

1. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak (Bina Keluarga Balita, Posyandu, Jumlah Panti Asuhan Anak)

TABEL 2.1
JUMLAH KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN KELANGSUNGAN HIDUP ANAK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	BINA KELUARGA BALITA (BKB)	BINA KELUARGA REMAJA (BKR)	POSYANDU	PAUD	PANTI ASUHAN ANAK
1	Lembah Sabil					
2	Manggeng					
3	Tangan - Tangan					
4	Setia					
5	Blangpidie					
6	Susoh					
7	Jeumpa					
8	Kuala Batee					
9	Babahrot					

Sumber Data : DPMP4, Dinkes, Dinsos, Disdik dan Kebudayaan

2. Kelembagaan Partisipasi Anak (Forum Anak, Kegiatan Extra Kulikuler, Organisasi Anak)

TABEL 2.2
JUMLAH KELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN

NO	KECAMATAN	FORUM ANAK	EXTRA KURIKULER	ORGANISASI ANAK	JUMLAH
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : DPMP4, Disdik dan Kebudayaan

3. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas Trafficking, Gugus Tugas KLA, Lembaga Pemasyarakatan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Komisi Pengawas Perlindungan Anak Aceh).

TABEL 2.3
 JUMLAH KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG LINGKUNGAN YANG KONDUSIF
 BAGI ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN

NO	KECAMATAN	GUGUS TUGAS TRAFICKING	GUGUS TUGAS KLA	LPA	LAINNYA
1	Lembah Sabil				
2	Manggeng				
3	Tangan - Tangan				
4	Setia				
5	Blangpidie				
6	Susoh				
7	Jeumpa				
8	Kuala Batee				
9	Babahrot				

Sumber Data : DPMP4 Abdya


 BUPATI ACEH BARAT DAYA,
 AKMAL IBRAHIM